

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anggaran

Menurut Puranta (2010) Anggaran merupakan alat bagi Pemerintah Daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran merupakan suatu alat perencanaan dan pengendalian mengenai pengeluaran dan penerimaan yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan badan/instansi untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Disamping itu, anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan belanja suatu instansi tersebut (Anggraini, 2017).

Anggaran sering juga disebut sebagai rencana keuangan karena anggaran yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter. Anggaran dalam suatu instansi adalah proses untuk merencanakan dan mengendalikan sebagai upaya mengestemasikan keuangan pada sebuah instansi. Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang ditetapkan dalam proses penyusunan program. Dimana anggaran disusun oleh manajemen untuk jangka waktu satu tahun, yang nantinya akan membawa instansi kepada kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya yang ditentukan.

Menurut Sasongko (2015) Anggaran merupakan alat manajemen (*manajemen tool*) suatu pemerintah atau badan sektor publik untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun mencerminkan secara tepat aktivitas yang dinyatakan dalam angka-angka sebagai upaya mencapai tujuan, misi maupun sasaran suatu pemerintah yang telah dijanjikan kepada rakyat.

Menurut Sasongko (2015) Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam satuan uang, barang atau jasa untuk waktu periode yang akan datang.

B. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah ikhtisar, sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh sektor pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Dengan demikian, laporan tersebut menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

C. Kinerja

Menurut Mashun (2009) kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Menurut Moehariono (2012) Pengukuran Kinerja mempunyai pengertian suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi. Lalu apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar

untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi kegiatan. Kinerja bisa diketahui hanya jika organisasi tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Kriteria tersebut berupa kesesuaian anggaran terhadap pelaksanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

Kinerja ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja dalam menilai kinerja di sebuah instansi atau organisasi. Apabila anggaran sudah tersusun dengan baik sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya, barulah pihak instansi meneliti lebih lanjut mengenai kinerja anggaran tersebut melalui suatu realisasi sebagai alat perbandingan dengan anggaran. Dengan adanya realisasi instansi akan mengetahui perbedaan yang terjadi dalam instansi. Anggaran yang telah disusun sebelum kegiatan dimulai dengan anggaran yang sedang berjalan, biasanya dalam kurun waktu satu tahun. Maka dari itu diperlukan perencanaan anggaran yang baik agar dapat meningkatkan kinerja dalam instansi, karena melalui anggaran dapat memberikan estimasi jumlah dan sumber penerimaan yang diperkirakan. Penyusunan anggaran mengacu pada rencana kegiatan di tahun yang akan datang, dengan terlebih dahulu membandingkan anggaran dan realisasi di tahun yang sedang berjalan. Hal ini untuk mengetahui kendala yang timbul antara anggaran dengan realisasi.

Terkadang anggaran itu tidak sesuai dengan realisasi. Dari tahun ke tahun anggaran dan realisasi mengalami peningkatan dan juga penurunan. Penurunan disebabkan adanya perubahan *bill of quantity*, adanya pembatalan beberapa kontrak yang telah ditandatangani, eksekusi kontrak dari pemberi kerja memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan peningkatan dari realisasi sebagian besar terjadi karena

diperolehnya kontak-kontrak baru yang semula tidak dianggarkan, perluasan pemasaran, optimalisasi aset, peningkatan kemampuan dan dukungan kesisteman, aliansi strategis, dan adaptasi teknologi.

D. Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Pendapatan ini dapat terlihat pada pos pendapatan. Konsep pendapatan berbeda dengan konsep penerimaan. Penerimaan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. Pendapatan yang terealisasi dan masuk kas daerah menjadi permintaan, tetapi tidak semua penerimaan merupakan pendapatan, karena ada penerimaan yang berasal dari pembiayaan (Puranta, 2010).

E. Pengertian Belanja Daerah

Belanja dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Belanja daerah berbeda dengan pengeluaran daerah. Tidak semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah yang menyebabkan berkurangnya kas di Rekening Kas Umum Daerah dikategorikan sebagai belanja. Namun setiap belanja merupakan pengeluaran pemerintah daerah (Mahmudi, 2016).